



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	237.140.125.629
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	161.562.690.962
1.1.1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	80.221.010.125
1.1.2	Kementerian Agama	59.277.363.243
1.1.3	Kementerian Keuangan	3.082.446.724
1.1.4	Kementerian Pertanian	257.806.612
1.1.5	Kementerian Perindustrian	983.591.274
1.1.6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	119.452.487
1.1.7	Kementerian Perhubungan	2.444.619.746
1.1.8	Kementerian Kesehatan	2.302.739.375
1.1.9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.986.839
1.1.10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	188.834.940
1.1.11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.319.655.579
1.1.12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	710.330.943
1.1.13	Kementerian Pertahanan	2.194.739.747
1.1.14	Kementerian Ketenagakerjaan	2.639.768.000
1.1.15	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	465.087.936
1.1.16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	117.600.000
1.1.17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	164.602.476
1.1.18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	218.105.516
1.1.19	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.204.541.531
1.1.20	Kementerian Perdagangan	14.607.869
1.1.21	Kepolisian Negara Republik Indonesia	500.000.000
1.1.22	Badan Intelijen Negara	500.000.000
1.1.23	Kejaksaan Republik Indonesia	500.000.000
1.1.24	Badan Riset dan Inovasi Nasional	32.800.000
1.2	Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	75.577.434.667



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribu rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	305.595.143.263
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	174.847.718.165
2.2	Dana Alokasi Khusus	128.668.425.098
2.2.1	DAK Fisik	15.820.300.000
2.2.2	DAK Non Fisik	112.848.125.098
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru ASND	50.450.843.688
2.2.2.2	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.476.330.539
2.2.2.3	Bantuan Operasional Sekolah	53.569.279.350
2.2.2.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.047.395.950
2.2.2.5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.467.218.660
2.2.2.6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000
2.2.2.7	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.667.081.911
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.079.000.000
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	69.500.000.000
3.1	Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)	10.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	5.000.000.000
3.3	Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000
3.4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	3.000.000.000
3.5	Pembiayaan Pendidikan	49.500.000.000
	Jumlah	612.235.268.892

Keterangan:

Rincian Anggaran Pendidikan belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBN 2023 oleh DPR RI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
A. Pembiayaan Utang	696.317.641.062
I. Surat Berharga Negara (Neto)	712.938.193.000
II. Pinjaman (Neto)	(16.620.551.938)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	749.450.378
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3.481.576.753
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(2.732.126.375)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(17.370.002.316)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	62.056.062.121
i. Pinjaman Tunai	29.500.000.000
ii. Pinjaman Kegiatan	32.556.062.121
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	31.490.814.604
(1) Pinjaman Kegiatan K/L	30.722.095.494
(2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	768.719.110
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	1.065.247.517
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(79.426.064.437)
B. Pembiayaan Investasi	(175.955.303.621)
I. Klaster Infrastruktur	(85.318.000.000)
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Utama Karya (Persero)	(28.884.000.000)
2. Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1.530.000.000)
3. Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(10.000.000.000)
4. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(25.424.000.000)
5. Investasi Pemerintah Nonpermanen untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	(19.480.000.000)
II. Klaster Pendidikan	(20.000.000.000)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	(20.000.000.000)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
a. Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)	(10.000.000.000)
b. Dana Abadi Penelitian	(5.000.000.000)
c. Dana Abadi Kebudayaan	(2.000.000.000)
d. Dana Abadi Perguruan Tinggi	(3.000.000.000)
III. Klaster Perlindungan Masyarakat	(4.300.000.000)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana	(4.300.000.000)
IV. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(4.789.910.242)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana Reboisasi	(2.225.200.000)
2. Penyertaan Modal Negara kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	(2.564.710.242)
V. Klaster Kerja Sama Internasional	(3.523.940.156)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	(2.000.000.000)
2. Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(266.796.415)
3. Investasi kepada International Finance Corporation (IFC)	(336.069.015)
4. Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(44.250.000)
5. Investasi kepada International Development Association (IDA)	(256.172.500)
6. Investasi kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(487.902.226)
7. Investasi kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	(132.750.000)
VI. Klaster Lainnya	(58.023.453.223)
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Len Industri (Persero)	(2.210.253.223)
2. Penyertaan Modal Negara kepada Perusahaan LPPNPI/Airnav Indonesia	(659.190.000)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
3. Cadangan Pembiayaan Investasi	(5.654.010.000)
4. Pembiayaan Pendidikan	(49.500.000.000)
C. Pemberian Pinjaman	5.284.746.297
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik	5.284.746.297
1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(1.065.247.517)
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	6.349.993.814
D. Kewajiban Penjaminan	(330.511.505)
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(296.151.505)
1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(7.702.826)
2. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(159.828.050)
3. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(6.744.701)
4. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(96.767.407)
5. Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan <i>Light Rail Transit /LRT</i> Jabodebek	(18.727.251)
6. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(6.381.270)
II. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	(34.360.000)
E. Pembiayaan Lainnya	72.834.860.828
I. Saldo Anggaran Lebih	70.000.000.000
II. Hasil Pengelolaan Aset	609.660.828



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
III. Rekening Pembangunan Hutan	2.225.200.000
JUMLAH	598.151.433.061

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum



[Signature]
Silvanna Djaman